

KONSEP DIRI MASYARAKAT KEPULAUAN

*Aholiab Watloly*¹

Abstrak

Kebudayaan Indonesia mempunyai akar yang kuat pada kebudayaan masyarakat kepulauan. Kebudayaan, khususnya pandangan filsafat masyarakat kepulauan ini, namun demikian, tidak banyak diungkap di dalam penelitian-penelitian filsafat maupun budaya. Penulisan ini oleh karenanya ingin menggali dan menjelaskan nilai-nilai filosofis yang membentuk konsep diri masyarakat kepulauan. Epistemologi digunakan sebagai objek formal penulisan, sementara yang menjadi objek material adalah pandangan dan cara hidup masyarakat kepulauan.

Tulisan ini menyimpulkan bahwa bagi masyarakat kepulauan, kepulauan tidak sekedar bermakna lokus teritorial, tetapi lokus kultural dan lokus personal, karena ia memiliki konsep diri dan arti sebagai ruang eksistensi. Setiap komunitas kepulauan selalu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan diri dalam sebuah konsep kosmologis dan sosio-kultural. Masing-masing komunitas mempunyai *local knowledge*, *local value*, serta *local institution* yang dibentuk dengan rasio alaminya yang asli. Rasio alami itu bertumbuh dari taraf kesadaran kosmik ke taraf kesadaran magis (religius), dan akhirnya taraf kesadaran sosial. Perlu adanya kemauan dan kebijakan untuk membangun ketahanan dan kemajuan eksistensi bangsa melalui pembangunan berbasis masyarakat kepulauan secara nyata serta berkesinambungan. Pembangunan masyarakat kepulauan harus menjadi salah satu ciri pembangunan nasional yang penting di Indonesia.

Kata kunci: konsep diri, masyarakat kepulauan, kebudayaan kepulauan, sosialitas masyarakat kepulauan, komunitas masyarakat kepulauan, Bhinneka Tunggal Ika.

Abstract

Indonesian culture has a strong root in a culture of island communities. The culture, especially philosophy of the island communities is not so much revealed in studies of philosophy and culture. Therefore, this article will explore and explain philosophical values that shape the self-concept of the island communities. Epistemology is used as a formal object, while the material object is the island communities' views and way of life.

This article concludes that for the island communities, their islands are not just meant as a territorial locus, but also a cultural and personal locus because the islands have a concept of self and a sense of space and existence. Every community always identifies and conceptualizes themselves in a cosmological and socio-cultural concept. Every community has local knowledges, values, and institutions that are formed by an original natural ratio. The natural ratio grows from cosmic consciousness level to magical (religious) consciousness, and finally social consciousness. Willingness and policies are needed to build resilience and progress of the nation existence through a development of the island communities manifestly. The development of island communities must become one of important features of national development in Indonesia.

Keywords: *self-concept, island communities, island culture, sociality of island communities, Unity in Diversity.*

¹ Staf pengajar pada FISIP UNPATTI, Ambon, Email: aholiabwatloly@ymail.com.

A. Pendahuluan

Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara yang merdeka, mandiri dan berdaulat dengan sebuah konsep diri yang jelas, yaitu Nusantara. Berdasarkan konsep dirinya itu, bahkan Indonesia secara *defacto* maupun *dejure* telah memerdekakan dirinya (meng-indonesiakan diri) sebagai negara kepulauan (*archipelagic country*) terbesar di dunia (Koentjaraningrat, 2007: 1-34). Konsep dirinya itu menjadi sebuah kebanggaan dan "senjata tersembunyi" yang digunakan untuk mengusir penjajah sebagai tamu tak berdaulat dari seluruh penjuru negeri ini dan menjadi "senjata pemersatu" bangsa yang begitu kuat. Konsep diri Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut menggambarkan sebuah keunikan diri sehingga dapat digunakan untuk membedakan Negara Indonesia (Nusantara) dengan bentuk negara lainnya di dunia. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia tidak dibangun atas sebuah pentas daratan yang tunggal dan homogen, tetapi negara yang dibangun dari sebuah realitas teritori kepulauan dan sosio-kultur kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.480 buah dan beribu ragam kebudayaan. Bertahun-tahun lamanya Indonesia telah berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara kepulauan atas dasar konsep dirinya tersebut. Perjuangan panjang tersebut dimulai sejak prakemerdekaan dengan adanya Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda (1928) yang menyatukan seluruh wilayah kepulauan Nusantara yang luas menjadi satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air; sampai dengan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ir. Djuanda, yang berakhir pada pengesahan *Islands Territory Principle* dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 17 tahun 1985.

Deklarasi Juanda tersebut didasarkan pada sebuah kesadaran yang faktual dan mendasar bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia sehingga dibuatlah suatu deklarasi tentang batas wilayah perairan kepulauan dengan jarak 12 mil laut yang terjauh dari pulau-pulau yang terletak terluar, yang secara berhubungan membentuk wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Deklarasi Juanda merupakan pernyataan resmi pemerintah RI mengenai perairan (laut) dan daratan kepulauan Indonesia, yang isinya sebagaimana dikutip oleh Rahardjo Adisasmita (2010: 24), yaitu:

"semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Negara Indonesia".

Rangkaian perjuangan tersebut makin memantapkan visi dan doktrin negara kepulauan Indonesia. Isi doktrin negara kepulauan itu adalah bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang mengakui dan meyakini adanya laut dan

darat sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional (Hankamnas). Wawasan Negara Kepulauan Indonesia itulah yang disebut dengan Wawasan Nusantara yang terdiri atas banyak gugusan kepulauan yang tersebar di sekitar garis Katulistiwa (ekuator), memanjang dari barat (Sabang) sampai ke ujung timur (Merauke); serta melintang dari ujung utara (Pulau Marore dan Pulau Miangas) sampai ke ujung selatan (Pulau Rote). Berbeda-beda tetapi dipersatukan menjadi satu dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pentas sosial dan budaya negara kepulauan Indonesia tersebut sungguh marak, dinamis, dan sekaligus problematis karena dihuni oleh ratusan komunitas masyarakat kepulauan, yang terdiri atas 587 suku bangsa dengan 587 bahasa daerah serta aneka tradisi adat dan kebudayaan, yang semuanya berbasis kepulauan dengan keunikan masing-masing. Komunitas-komunitas masyarakat kepulauan tersebut memiliki citra kepribadian dengan latar geoteritori, politik, ekonomi, maupun sosio-kulturalnya yang berbeda serta tingkat kemajuan yang tidak merata, sehingga makin menambah khasanah kemajemukan dan perbedaan yang begitu hakiki dari masyarakat Nusantara.

Hubungan masyarakat kepulauan dengan keutuhan alam kepulauannya (laut, darat, serta gejala alam kepulauannya), menggambarkan atau mencerminkan sebuah keunikan habitat, dalam kepenuhan hak-hak eksistensinya (hak keberadaan dan hak keberlanjutan hidup), hak kodrati, dan hak ideologis keindonesiaannya yang utuh (Watloly, 2005: 19). Keutuhan dan kepenuhan hak eksistensi, hak kodrati, dan hak ideologis menjadi sebuah keutamaan hidup dari masing-masing komunitas masyarakat kepulauan, baik dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Hak-hak hidup masyarakat kepulauan tersebut bukan hanya terdapat dalam sebuah jaminan eksistensi sosial, tetapi juga dengan eksistensi alam kepulauannya yang *biner* dan saling bertautan. Konsekuensinya, kebertautan hidup masyarakat kepulauan dengan alam kepulauan, baik laut, darat, gunung, tanjung, *meti*, dengan segala spesies habitatnya, termasuk di dalamnya, siklus tradisi, adat istiadat, maupun paham kosmologi serta sistem ritus dan keyakinan kepribumiannya, bukan hanya berfungsi sebagai penyangga ekologis, tetapi istimewa sebagai penyangga eksistensi bagi setiap komunitas masyarakat kepulauan.

Gambaran di atas memperlihatkan juga bahwa kepulauan (baik itu pulau kecil, besar, jauh terisolasi dan terbelakang maupun dekat) selalu menjadi rumah eksistensi dan istana diri yang penuh keutamaan hak hidup bagi masing-masing komunitas masyarakat kepulauannya. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa masing-masing masyarakat kepulauan memiliki ruang kepribadiannya yang khas, karena setiap manusia (individu maupun komunitas) kepulauan mengidentikkan diri dalam sebuah ruang personal kepulauan dengan sebuah pemakna-

an diri yang khas, sistemik, dan mendasar. Pulau, kepulauan dan dirinya adalah sebuah fakta diri atau fakta eksistensi yang tidak dapat dipisahkan, karena dari pulau itulah ia menerima status sosial dan penamaan diri dengan segala hak keistimewaannya. Semuanya memaknakan adanya sebuah konsep diri yang begitu kuat tertanam dalam sistem maupun isi pemikiran serta praktek hidup masyarakat kepulauan. Konsekuensinya, bila menyebut orang Madura, adalah sebuah konsep diri (istana diri) yang khas, unik, dan berbeda dengan Orang Riau, Orang Bali, Orang Jawa, Orang Nias, Orang Kei, Orang Damer, Orang Sumba, Orang Flores, Orang Ambon, Orang Selatan Daya, Orang Makasar, Orang Bugis, Orang Bangka Belitung, Orang Aru, dan sebagainya.

Permasalahan pokok yang dipecahkan dalam penulisan ini sehubungan dengan uraian di atas adalah: nilai-nilai pemikiran filosofis apakah yang membentuk konsep diri masyarakat kepulauan? Secara filsafati, konsep diri merupakan bagian dari hakikat keberadaan manusia maupun masyarakat manusia yang melekat pada setiap diri individu maupun diri sosialnya (komunalnya). Konsep diri merupakan sifat yang unik pada manusia atau masyarakat manusia, sehingga dapat digunakan untuk membedakan dirinya dari makhluk hidup lainnya atau membedakan suatu bentuk masyarakat dengan bentuk masyarakat lainnya. Menurut Burns (1993:vi) konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan dan orang-orang lain berpendapat mengenai diri kita dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. Berbeda dengan Burns yang memandang konsep diri sebagai gabungan pandangan diri sendiri dan orang lain tentang dirinya, Hurlock (1990: 58) memahami konsep diri dari perspektif subjek yang mengkonsepsikan dirinya. Menurut Hurlock, konsep diri (*self concept*) adalah gambaran tunggal yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang tentang dirinya. Pikiran yang sama juga nampak dalam Centi (1993:9) yang mengemukakan bahwa konsep diri (*self-concept*) tidak lain tidak bukan adalah gagasan tentang diri sendiri. Hurlock maupun Centi seolah-olah bersepakat bahwa konsep diri terdiri atas cara manusia atau masyarakat manusia melihat dirinya sendiri sebagai pribadi, cara merasa tentang diri sendiri dan cara menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana ia atau mereka harapkan.

Dapat disimpulkan, berdasarkan uraian di atas, sementara ini bahwa konsep diri merupakan keyakinan, perasaan, pandangan, atau penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap dirinya yang meliputi kemampuan, karakter, sikap, kejiwaan, sosial, emosional, fisik, aspirasi, maupun prestasi yang dimilikinya. Kajian filsafati ini, sesuai model pendekatannya, yaitu epistemologi, berusaha menyingkap dan mengkaji konsep diri (*self concept*) masyarakat kepulauan dalam perspektif lokal (*indigenous perspective*) masyarakat kepulauan. Melalui cara itu dapat dijelaskan bahwa konsep diri masyarakat kepulauan adalah pandangan masing-masing masyarakat lokal kepulauan

mengenai hakikat dirinya dalam berbagai kategori ideal yang dimilikinya.

Pendekatan yang digunakan dalam menggali nilai-nilai pemikiran filosofis yang dimaksud adalah pendekatan epistemologi sebagai objek formal penulisan. Epistemologi dalam konteks ini dipahami sebagai upaya filsafati dalam rangka menyingkap hakikat pemikiran dan dasar-dasar pemikiran masyarakat kepulauan mengenai konsep dirinya serta menguji dan mendeskripsikan serta menempatkannya pada sebuah tataran pengetahuan yang bersifat hipotetis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik yang terkait dengan hakikat hidup masyarakat kepulauan itu sendiri. Objek material penulisan ini adalah pandangan, mitos tradisi dan cara hidup masyarakat kepulauan dengan dasar asumsi bahwa setiap pandangan, mitos tradisi dan cara hidup masyarakat kepulauan selalu mengandung kode-kode epistemologis yang khas, berupa sistem pemikiran serta isi pemikiran yang valid dan sah bagi komunitasnya masing-masing. Pengkajian filsafati mengenai konsep diri masyarakat kepulauan, khususnya yang terkait dengan masyarakat kepulauan Indonesia dan lebih khusus lagi di Maluku, sejauh pengamatan penulis, belum pernah dilakukan, dan karena itu, penulisan ini memiliki originalitas, baik secara filosofis maupun sosiokultural, yang bisa dijamin.

Hasil pengkajian epistemologi di atas menunjukkan adanya nilai-nilai pemikiran yang begitu kuat mendasar dari setiap pandangan, mitos tradisi dan cara hidup masyarakat kepulauan. Semuanya memaknakan adanya konsep diri yang begitu unik dan beraneka ragam pada masing-masing komunitas masyarakat kepulauan. Gagasan dan nilai-nilai pemikiran (epistemologis) yang terkait dengan konsep diri masyarakat kepulauan dimaksud, selalu terkait dengan latar fisik, sosial, budaya maupun kepribadian yang memaknakan sebuah fakta eksistensi yang begitu nyata dan unik bagi masing-masing komunitas masyarakat kepulauan dimaksud.

B. Skema Filosofi Konsep Diri Masyarakat Kepulauan

1. Konsep diri yang *binar*

Masyarakat kepulauan bukanlah masyarakat tak bernama akan sebuah arti diri atau konsep diri serta tak bertuan akan sebuah hak identitas. Secara filsafati, justru hendak ditegaskan bahwa mereka pada basis kepulauannya memiliki kebenaran diri (*true self*), konsep diri (*self concept*) yang menggambarkan adanya hak kepribadian, hak sosial, budaya, dan hak ideologis sebagai keutamaan hidup yang hakiki (primer) pada dirinya. Masyarakat kepulauan, sebagaimana komunitas lainnya, adalah sebuah komunitas yang berbudi-bahasa, bercita-cita, berhati nurani, berbudaya, dan beradat sebagai hak istimewa (*privileged*). Semuanya memaknakan adanya konsep diri masyarakat kepulauan itu sendiri, yang tidak sekedar bersifat verbalistik (yang mati), tetapi bentuk keberadaan yang bersinar (binar).

Sebuah konsep diri yang binar tidak terformat dalam sebuah ruang vakum, berupa rumusan yang bersifat kaku atau statis, karena berada dalam sebuah struktur kemenjadian melalui perilaku-perilaku etis yang nyata dalam konteksnya masing-masing. Ia beraktivitas (menjadi) dalam sebuah ruang keberadaan (eksistensi) yang dinampakkan dalam penghayatan jiwa, dalam karakter hidup, dan modus perilaku yang utuh (sistemik) dengan lingkungan laut maupun daratnya. Ia tidak sekedar disimpan dalam memori atau dokumen, tetapi dilakoni secara nyata dalam kehidupan harian sebagai sebuah dunia milik kehidupan yang berharga, bermartabat, dan membahagiakan.

Konsep diri masyarakat kepulauan yang binar bersinergi pula dengan berbagai dimensinya, yaitu: dimensi individual dan komunal (sosial). Alasannya, konsep diri masyarakat kepulauan itu bukan hanya dipahami dan dilakoni sebagai sebuah makna diri oleh tiap individu, tetapi mengikat dan mengharuskan dalam sebuah kesatuan (komunal) adat yang total dan saling menghidup-hidupkan sebagai sebuah habitat hidup yang tak dapat dipisahkan.

Orang, karena itu, hendaknya tidak bersikap tak acuh dan dingin terhadap realitas masyarakat kepulauan, dengan mengembangkan prasangka-prasangka buta (*prejudice*) atau berusaha membangun gambaran buruk dan cap buruk (*stereotype*) terhadap masyarakat kepulauan. Justru sebaliknya, harus terbuka terhadap berbagai modus tindakan, tradisi hidup, struktur sosial, sistem sosial, strata sosial, serta berbagai pandangan hidup dan modus kearifan (*local wisdom*) sebagai praktek baik dari masyarakat kepulauan yang berisi keajegan-keajegan sosial. Semuanya sarat kandungan epistemologis yang berupa jenis pemikiran dan pengetahuan yang standar serta penuh arti dan makna tentang hakikat masyarakat kepulauan itu sendiri.

Daratan pulau dan laut adalah sebuah totalitas ruang hidup yang biner dan penuh arti bagi masing-masing masyarakat kepulauan dalam menjelaskan arti dan hakikat dirinya. Daratan dan lautan kepulauan adalah sebuah lingkungan gagasan diri, dengan kode-kode epistemologis yang sarat wawasan pemikiran maupun sistem keyakinan hidupnya. Daratan, sebagaimana lautannya, tidak dapat dipisahkan karena memiliki kedudukan *causal* dalam menjelaskan arti penghayatan diri masyarakat kepulauan sebagai sebuah fakta eksistensi dengan kepenuhan arti dan makna yang hakiki dan fundamental. Hubungan-hubungan *causal* yang bersifat normatif-etis itu mungkin sekali tidak dapat mereka jelaskan tetapi dapat dibaca dan disimak (dipahami) dalam sebuah penghayatan jiwa dengan keajegan-keajegan sosialnya, karena mengandung konsep diri yang secara langsung menunjuk pada hakikat diri masyarakat kepulauan dengan segala kekayaan khasanah nilai dan pesona diri yang sarat, baik secara kosmologis, ekologis, maupun sosio-kulturalnya.

Selanjutnya, terlihat pula bahwa konsep diri dari masing-masing masyarakat kepulauan didasarkan pada sebuah pengandaian filosofis yang bukan hanya “pro realitas”, tetapi secara hakiki “pro eksis-

tensi". Artinya, konsep diri itu mendukung kepenuhan eksistensi dan kepenuhan hak hidup masing-masing. Ia karena itu bukan sekedar bersifat kebenaran logis, politis, atau permainan ide dan wacana, tetapi adalah kebenaran eksistensial yang riil, faktual, dan berkelanjutan. Argumen-argumen filsafati itu bersifat etis dengan kepenuhan kewajaran nilai-nilai yang bersifat afirmatif logis maupun ideologis, dan karenanya, harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari.

Ia mengafirmasi atau menegaskan adanya sebuah keutuhan eksistensi yang bersifat mutlak (*ultimate value*) sebagai hak kepribadian dan keutamaan hidup yang tiada duanya bagi diri dan masing-masing komunitas masyarakat kepulauan. Masyarakat kepulauan mengandung konsep diri (*self concept*) yang bermakna perintah (*imperative*) dan harus dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan hak hidup dan hak keberlanjutan hidup (*sustainable livelihood*) masyarakat kepulauan guna mewujudkan sebuah ciri masyarakat kepulauan yang otonom, emansipatif, dan berkesejahteraan.

Ketegasan filsafati ini untuk menunjukkan bahwa setiap masyarakat kepulauan pada basis-basis komunitas maupun teritorialnya memiliki sebuah fakta kebenaran diri dengan aneka konsep diri yang sangat hakiki dan fundamental. Realitas itu tidak selamanya bersifat anonim karena mengandung kode-kode kehidupan dan mengekspresikan berbagai ruang eksistensi (posisi diri) yang sarat dengan nilai keberadaan. Konsep diri (cara pandang diri) masyarakat kepulauan itulah yang sekaligus menandai adanya sebuah keunikan habitat dengan otentitas diri yang bernilai dengan skemata-skemata perilaku cerdas dalam rangka mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan hak keberlanjutan hidup komunitasnya dalam sebuah siklus pembangunan bangsa Indonesia, dalam mewujudkan arti dan tujuan berbangsa sebagai masyarakat adil dan makmur.

2. Konsep diri yang dibangun dengan rasio sosial-adat

Penelusuran filsafati atas berbagai konsep diri masyarakat kepulauan di wilayah kepulauan Maluku menunjukkan bahwa masing-masing konsep diri masyarakat kepulauan yang khas dan saling berbeda itu bukan didasarkan pada sebuah rasio akademis tetapi rasio sosial-adat yang bersifat kontekstual dan beraneka ragam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masing-masing masyarakat kepulauan memiliki rasio sosial yang sifatnya adatis. Pola struktur rasional sosial-adat tersebut tidak mengandung sebuah penalaran lurus, tetapi penalaran yang sifatnya melingkar (siklus) dengan daya refleksi dari cermin hati yang mendalam. Masyarakat kepulauan yang adatis tidak terbiasa berpikir lurus, tetapi selalu berpikir dalam sebuah siklus tradisi yang sistemik dan berulang-ulang untuk menjaga harmoni sambil melakukan disposisi diri, baik sebagai individu maupun komunal (komunitas adat).

Masyarakat adat kepulauan memiliki sebuah rasio adat dalam menyingkap konsep individualitasnya (fisik maupun rohani) dengan cara memahami aneka kode, lambang, atau misteri pemikirannya yang terkait dengan hakikat tubuh individual secara utuh, teratur, dan sistemik dalam sebuah paham kemanusiaan yang hakiki (asasi). Boulan dan Syauta, misalnya, menjelaskan konsep tubuh individual manusia Maluku itu dengan konsep *Asa* yang berarti kesatuan hubungan antara dimensi supranatural atau Allah (*Kapua Upu Ilah Kahuresi*) dan dimensi kemanusiaan (Boulan dan Syauta, 1984: 5). Manusia dalam keyakinan itu memahami dirinya sebagai karya ciptaan Allah dalam satu kesatuan dengan alam (langit dan bumi). Konsep tubuh individual itu digambarkannya sebagai pesona manusia pribadi yang meliputi unsur: udara (langit), roh (zat illahi), dan alam (benda alam). Konsep diri dengan rasio adat itulah yang disebut Manusia *Siwa Lima*. Konsep diri manusia *Siwa Lima* itu menunjukkan sebuah wujud kesempurnaan yang dinamis karena menjadi inti (pusat) konsentris antara unsur keilahian dan keinsanian, fungsi fisik maupun spiritual, serta alam (bumi) ke-Maluku-an. Kenyataan itulah yang diperlihatkan secara khusus dalam sebuah pandangan tentang *Asa* sebagai salah satu wujud kemanusiaan orang Maluku dalam alam pikiran *Siwa Lima*. Pandangan kemanusiaan ini menjadi dasar kemanusiaan *Salam-Sarane* maupun kemanusiaan orang Maluku yang multireligius sebagaimana disebutkan di atas. Tatanan pemikiran (*Asa*) itu bersifat sistemik, antara langit (matahari=logika Ilahi), bulan (pengawal bumi) dan ibu bumi (pengayom bumi), sebagai satu kesatuan dengan keutuhan aspirasinya yang sakral. Konsep itu kemudian, seolah-olah mendisposisikan tubuh manusia dalam tiga dunia, yaitu *uru* (kepala), *hesam-hesa* (pusat), dan *hatu* (alas, kaki).

Rasio adat tersebut menunjukkan pula sebuah konsep diri yang bersifat kosmologis, yaitu pandangan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan ini memahami hakikat diri dalam sebuah keutuhan yang sinergis dalam tatanan keteraturan kosmos (alam kepulauan) melalui sebuah penghayatan kejiwaan alami yang khas. Logisnya, mereka selalu mengidentifikasi dan mendefinisi atau mengkonseptiskan dirinya masing-masing secara luas dan mendalam terkait dengan realitas alam kepulauannya (masa benda padat, cair, maupun aneka simbol alam) yang dimiliki. Pada konteks masyarakat kepulauan Maluku, konsep tubuh yang kosmologis ini dapat dilacak dalam berbagai kearifan lokal atau dalam berbagai istilah, seperti: *dusun*, *gunung tanah*, *meti* (wilayah laut), dan sebagainya, yang setiap individu mendisposisikan dirinya sebagai sebuah makna kehadiran diri dalam setiap teritori *dusun*, *meti*, atau ungkapan gunung tanah tersebut. Sebagai contoh, masyarakat Pulau Buru di Kepulauan Maluku yang secara kosmologis adatis memahami keutuhan Pulau Buru dalam sebuah konsep diri manusia Pulau Buru dengan dinamisme kosmisnya. Hal ini menunjukkan bahwa relasi masyarakat kepulauan dengan lingkungan alam kepulauannya (fisik, sosial, budaya, dan kejiwaan

alami) membuat mereka sekali-kali tidak netral terhadap lingkungannya. Realitas tersebut membentuk semacam ekologi pemikiran dengan muatan kognitif maupun sistem keyakinan kepribumian yang khas baginya.

Dapat dilihat berdasarkan uraian di atas bahwa konsep diri masyarakat kepulauan sebagai sebuah etnis sosial budaya yang memiliki sistem nilai, mempunyai beberapa wujud, antara lain: orientasi hidup dan martabat diri; selalu berusaha menunjukkan bukti arti keberadaan diri yang nyata dalam pola kehidupan mereka setiap hari. Semua konsep diri itu tertata dalam sinergitas yang biner (hidup saling terkait dan dinamis), sehingga tidak dapat dilepaspisahkan.

3. Konsep diri yang dibangun dari arus kesadaran eksistensi

Istilah masyarakat kepulauan bukanlah sekedar sebutan atau penamaan diri (atributif) yang sifatnya verbalistik, tetapi lebih sebagai wujud akumulasi dari adanya sebuah arus utama kesadaran diri (*live mainstreaming*) yang membentuk konsep diri yang khas bagi masing-masing komunitas masyarakat kepulauan. Arus utama kesadaran diri tersebut tidak berdasarkan pada sebuah rasio formal yang bersifat deduktif (akademis), tetapi lebih bersifat cara pandang lokal (*indigenous perspective*) tentang diri sendiri. Arus kesadaran diri itulah yang selalu aktif bekerja dalam pikiran, perasaan, sikap dan perilaku, serta tindakan-tindakan cerdas dalam membangun dan mempertahankan hidup secara berkelanjutan di dalam wilayah kepulauannya masing-masing. Artinya, realitas hidup masyarakat kepulauan, baik secara otonom (pulau) maupun gugus pulau, memaknakan sebuah “istana diri” (bukan istana pengasingan”) dengan segala kekayaan fenomena dan energi sosialnya.

Arus utama kesadaran diri yang membentuk konsep diri masyarakat kepulauan tersebut selalu memaknakan adanya empat kebenaran utama, yaitu: pertama, adanya keyakinan tentang sebuah kebenaran diri (*true self*) yang dimiliki dan dijalani dalam hidup sehari-hari. Kebenaran diri tersebut bukan sekedar isu, ilusi atau sekedar permainan logika, tetapi adalah fakta eksistensial yang riil dalam penghayatan dan tindakan atau *lakon* hidup sehari-hari (bukti keseharian), sehingga tidak dapat diganti atau diingkari. Kedua, adanya sebuah hak kepribadian (*privacy*) yang bersifat primer dengan kepenuhan nilai kehidupan yang dijamin. Ketiga, adanya hak keutamaan atau hak istimewa (*priveledge*) yang memaknakan adanya sebuah martabat diri yang bersifat mutlak (*ultimate value*). Keempat, adanya sebuah kepemilikan status dan peran sebagai pewaris abadi dalam pembangunan kepulauan.

Masyarakat kepulauan juga memiliki cara pandang ke dalam (*intrinsic*) dan cara pandang ke luar (*extrinsic*) untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan arti dirinya masing-masing. Cara pandang ke dalam (*intrinsic*) tersebut hendak mengafirmasi atau menegaskan

adanya otonomi diri masing-masing dalam sebuah teritori diri atau ruang kepribadian kosmik, ideologis, maupun sosio-kultural yang utuh pada lingkup negeri atau desanya masing-masing. Cara pandang keluar (*extrinsic*), di sisi lain, hendak menegaskan atau mengafirmasi sebuah keterkaitan antara komunitas masyarakat adat kepulauan dalam sebuah teritori diri atau ruang kepribadian kosmik, ideologis, maupun sosio-kultural yang utuh secara lintas kepulauan. Terlihat di sini bahwa semua cara pandangan diri masyarakat kepulauan itu meliputi pula sebuah horizon wawasan laut dan perairan yang menghubungkan secara erat berbagai komunitas pulau dan bagian alam pulau lainnya menjadi satu kesatuan geo sosio-kultural, ekonomi, dan politik. Pada posisi inilah orang harus berbicara tentang sebuah pendekatan *emic* dan *etic* untuk menggali, menemukan dan mengkonstruksikan konsep diri masyarakat kepulauan di atas. Pendekatan *emic* adalah cara pandang dari dalam kehidupan diri dan masing-masing komunitas masyarakat kepulauan untuk mengungkapkan arti atau konsep dirinya, sementara pendekatan *etic* adalah sebuah cara pandang bersama, atau cara pandang secara etik dari masyarakat kepulauan untuk mengekspresikan arti serta konsep dirinya bersama.

Masing-masing cara pandang masyarakat kepulauan di atas menunjukkan bahwa pengenalan yang baik akan konsep diri masyarakat kepulauan harus dikembangkan dari sebuah perspektif sosiologi mikro masyarakat kepulauan yang bersifat *indigenous perspective*. Sejarah menunjukkan bahwa debat dan argumen makro tentang sebuah realitas sosial telah banyak melahirkan (memproduksi) aneka konsepsi teoretis tentang hakikat masyarakat yang diidealkan oleh setiap filsuf dan sosiolog. Permainan argumen (rasio) dan narasi-narasi teoretis tersebut, namun demikian, masih tetap bersifat sementara (hipotetis) dalam membangun sebuah pembenaran (justifikasi) keilmuan (ilmiah) terhadap sebuah realitas sosial pada tataran mikro yang memiliki khasanah diri, kode kepribadian, dan ruang personal, maupun ruang sosial yang khusus (khas) (Kleden, 1987: 6). Konsekuensi filosofisnya, dibutuhkan sebuah sikap ilmiah yang terbuka pada konsep-konsep lokal masyarakat kepulauan dalam memahami hakikat konsep diri masyarakat kepulauan agar orang tidak jauh atau hilang dari realitas dirinya yang benar-benar dihayati dan dilakoni secara nyata.

4. Konsep diri yang inklusif

Berbagai *local knowledge* masyarakat kepulauan di Maluku sebagaimana dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa konsep diri masyarakat kepulauan bukanlah sebuah rumusan rasional yang objektif formal dan tersurat, tetapi tersirat atau tersamar (*inclusive*). Kesulitan untuk menunjukkan konsep diri dari masing-masing komunitas masyarakat kepulauan memang ada karena hal itu memang tidak jelas tertulis dalam rumusan-rumusan (dokumen) akademis resmi yang eksklusif, deduktif, dan normatif. Masyarakat kepulauan tidak terbia-

sa mewakilkan kehadiran arti dirinya secara objektif-formal dalam rumusan tertulis sebagai sebuah bukti eksemplaris yang sah, tetapi justru selalu menunjukkan atau membuktikan dalam keyakinan dirinya bersama serta dalam *lakon* kearifan hidup nyata (dinamis) sebagai arti diri yang sesungguhnya. Mereka mungkin tidak sanggup menjelaskan konsep dirinya dalam ucapan atau rumusan rasio akademis, tetapi bisa menunjukkannya secara langsung dalam tindakan penghayatan dan pengamalan hidup secara nyata.

Konsep diri dari masing-masing komunitas masyarakat kepulauan oleh karena itu selalu dihadirkan dalam berbagai kode keberadaan nilai yang tersirat atau tersamar (inklusif) dalam berbagai wujud, antara lain: kearifan hidup, simbol, legenda, mitos, aturan adat, lagu, pantun, syair adat, suara, gerak, dan praktek (etika kehidupan), baik dalam keterkaitan dengan alam (kosmos) maupun kehidupan sosial budaya yang bersifat fisik (material) maupun metafisik (spiritual). Konsep diri itu muncul, bukan sebagai sebuah kepastian teori atau dokumen ilmiah, tetapi kepastian hidup yang bertubuh, berjiwa, dan beraktivitas dalam kepenuhan makna.

Konsep diri itu tidak dinampakkan dengan pola nalar yang lurus, jelas, langsung serta terpilah (*clear and distinct*), seperti yang dikehendaki oleh filsuf rasional Rene Descartes. Justru, sebaliknya selalu didapati fakta bahwa setiap masyarakat kepulauan tersebut memiliki konsep diri yang bersifat tersamar atau tersirat (bersifat tak langsung) dalam berbagai bentuk kepercayaan dan cerita hidup. Konsep diri masing-masing masyarakat kepulauan itu bahkan cenderung bersembunyi (*hidden*) di balik berbagai sistem-sistem keyakinan, tradisi, dan atraksi hidup masyarakat kepulauan itu masing-masing. Akibatnya, sulit ditangkap secara jelas dengan kasat mata atau dengan pola nalar dan pemikiran yang biasa. Segala realitas masyarakat kepulauan, seperti: hubungan mereka dengan alam, kehidupan adat, ritus, legenda, mitos, lagu, tarian, jejaring sosial, dan sebagainya, hanya menunjukkan berbagai kode (tanda) yang mengandaikan atau menyiratkan secara tersamar identitas diri mereka yang sesungguhnya. Masing-masing kode atau tanda diri itu pun memiliki isi pikiran, struktur nalar yang kontekstual, serta lingkup pengembangannya sendiri-sendiri sehingga perlu diselami secara lebih mendalam dengan nalar sosial dan batin yang mendalam dari masing-masing komunitas.

5. Konsep diri yang ditunjukkan dalam aneka tradisi hidup

Masyarakat kepulauan yang telah begitu kerasan dalam sebuah tugas alam untuk berjuang menghadapi serta menyikapi iklim alam kepulauannya yang ekstrim dan keterisolasian yang cukup berat dalam mempertahankan hidup telah menemukan sebuah cara pandang kepribadian dan cara pandang kebersamaan dalam menata dan membangun kehidupan sosialnya. Sosialitas mereka adalah sosialitas yang berbasis kepulauan dengan keunikan ruang sosial dan aksesibilitas-

nya. Mereka memiliki pula sikap dan orientasi pembangunan yang jelas sesuai karakter geografis, pandangan kosmologis, sosiokultural, serta historisnya (Ajawaila, 2002: 15). Hal tersebut dapat digali dari berbagai teknik perladangan, pengolahan lahan, pengerjaan dusun, teknik beternak, membuat lumbung, teknik bertenun, teknik penataan sistem-sistem sosial yang produktif, seperti: *rurehe*, *masohi*, dan teknik pelestarian lingkungan (*sasi*, *hawear*).

Konsepsi maupun penghayatan masyarakat kepulauan tentang keutuhan laut-pulau (darat) sebagai totalitas ruang hidupnya telah membentuk persepsi mereka tentang luas laut kepulauannya yang sejauh menjadi akses hidupnya, termasuk segala yang ada di dalamnya. Laut pulau (kepulauan) sebagaimana darat (pulau) adalah panggung sosial yang mementaskan peristiwa-peristiwa sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat kepulauan. Kenyataan tersebut bagi masyarakat kepulauan (Maluku) membentuk pula semacam cara pandang eksistensi yang bersifat gugusan pulau sebagai sebuah totalitas eksistensi yang bermartabat dan ruang personal (*privacy*) yang sah dan tidak dapat dipisahkan. Semuanya terpatri dalam berbagai bentuk kesadaran kosmik, politis, maupun sosio-kultural masyarakat kepulauan yang terabadikan dalam berbagai vokal kehidupan masyarakat kepulauan. Kepulauan yang dimaksudkan di sini adalah sekumpulan (gugus) pulau-pulau besar maupun kecil pada satu kawasan perairan yang saling memiliki keterkaitan sosial budaya, dan hubungannya dengan laut namun memiliki keragaman tipikal. Wujud keeratan alami antarpulau tersebut mencirikan sebuah kesatuan geografis, sosial, ekonomi, dan politik.

Visi dan cara pandang pembangunan masyarakat kepulauan itu bukannya tidak rasional, tetapi justru didasarkan pada dua kategori rasio, yaitu: rasio alami dan rasio sosialnya yang khas. Kedua jenis rasio tersebut, dalam perspektif masyarakat pribumi, tidak berfungsi eksplanatif (memberi argumentasi dan penjelasan-penjelasan ilmiah dan rasional), tetapi berfungsi etis (memberi persuasi dan pembimbingan) untuk “praktek baik” dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan hidup dalam sebuah kearifan hidup yang mendasar. Praktik hidup etis itu membuat mereka bukan hanya merawat diri dengan apa yang dimiliki, tetapi juga memiliki daya kultural dalam melakukan transformasi, akulturasi, transaksi kultural, dan sintesis-sintesis budaya baru, melalui proses komunikasi dan percaturan budaya secara luas (Kaplan dan Manners, 2002).

6. Konsep diri masyarakat kepulauan dalam memperkuat visi kebangsaan Republik Indonesia

Pengakuan akan hak eksistensi dan pementapan konsep diri masyarakat kepulauan berdampak simultan terhadap pementapan wawasan kebangsaan dan corak hidup bernegara dalam keindonesiaan yang utuh dan jelas. Kejelasan pandangan (cara pandang) masyara-

kat kepulauan tentang konsep dirinya masing-masing, dengan keabsahan logis maupun ideologisnya sebagai wujud *adiluhung* pemikiran Pancasila, akan menjadi fondasi-fondasi yang kokoh bagi penguatan visi kebangsaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam sebuah negara kepulauan besar di dunia.

Kejelasan cara pandang tentang konsep diri dan hakikat diri masyarakat kepulauan tersebut dengan demikian adalah hal yang *genuine* dan otentik bagi penduduk asli bangsa Indonesia, yang bila terus dipertahankan serta dikembangkan secara kuat dan mandiri akan makin memantapkan wawasan hidup berbangsa dan bernegara sehingga menjadi bangsa dan negara yang kuat. Konsekuensi logisnya, pembinaan konsep diri keindonesiaan secara mantap, kuat dan mandiri hanya dapat dilakukan melalui penguatan konsep diri masyarakat kepulauan dan visi pembangunan yang berbasis masyarakat dalam rangka pembinaan teritorial, pertahanan negara, bela negara, maupun kesejahteraan masyarakat Indonesia secara utuh. Penegasan filsafati tersebut hendak menunjukkan bahwa pengakuan diri sebagai negara kepulauan (*archipelagic country*) tidak dapat dilepaspisahkan dari hakikat diri masyarakat kepulauan yang menjadi penyebab asal (*causa materialis*) atau penyebab utama (*causa prima*), maupun penyebab aktif (*causa efisiens*) dan penyebab bentuk (*causa formalis*) dari NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pengakuan diri yang terbangun dari konsep diri masyarakat kepulauan itulah yang melahirkan cara pandang bangsa dan negara Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara.

C. Menyingkap Konsep Diri Masyarakat Kepulauan dalam Tatanan Ruang Sosial, Ruang Budaya, dan Ruang Kepribadian

Masyarakat kepulauan memiliki sebuah konsep diri yang terkait erat dengan konsep ruang sosial, ruang budaya, dan ruang kepribadiannya masing-masing. Hal ini, dalam perspektif sosiologi mikro, nampak bahwa masyarakat kepulauan adalah sebuah ciri kodrati dan sukma eksistensi yang mencerminkan nilai, martabat, dan energi batin keindonesiaan yang hakiki dan fundamental. Energi batin masyarakat kepulauan itu berwujud dalam berbagai ruang sosial masyarakat kepulauan yang bersifat kontekstual dengan aneka modus penampakkannya, seperti: perbedaan suara (vokal) struktur sosial serta bentuk penyuaran (*voicing*) masyarakat kepulauan.

Setiap ragam suara (*voice of the archipelago*) dan bentuk kehidupan sosial masyarakat kepulauan tersebut bukan hanya menampilkan adanya bentuk-bentuk perbedaan citra lahiriah (penampilan luar atau empirik dari masyarakat kepulauan), seperti dalam bentuk: kata, kalimat, irama, artikulasi, dan perilaku berbahasa serta ragam gaya hidup (*style of life*), tetapi secara hakiki menegaskan sebuah ruang kultural yang unik esotik dan eksotik (Watloly, 2011: 7). Dimensi ru-

ang kultural masyarakat kepulauan tersebut tampak dalam aneka perbedaan penampakan batiniah (penampilan dalam), seperti: isi pikiran, kedalaman makna, serta kehangatan cita rasa yang memberi gambaran identitas kesukuan dan kesukmaan masyarakat kepulauan Indonesia yang beraneka ragam (kaya). Semuanya membentuk pula adanya aneka mazhab pemikiran pada masing-masing masyarakat kepulauan dengan tema-tema filosofinya yang asli, serta aneka pengaruh pemikiran dan kebudayaan Timur dan Barat yang teradopsi di dalamnya.

Kebudayaan Indonesia dengan demikian mempunyai landasan atau akar budaya yang sangat kuat pada tradisi dan kebudayaan masyarakat kepulauan. Kebudayaan masyarakat kepulauan atau kebudayaan Masyarakat Nusantara berkembang dengan variasinya yang sangat kaya. Ia terbingkai dalam keunikan lingkungan kebudayaannya, baik yang berlingkungan hutan, pesisir, laut, sungai, danau, gunung, lembah, dan lain-lain, serta mengukir warna-warni perilaku, seni hidup (tradisi) dan kebudayaan mereka. Sukma hidup masyarakat kepulauan Indonesia itu telah begitu kuat tertanam dan mengakar dalam sebuah watak hidup masyarakat kepulauan. Semua nilai kesukmaan itulah yang saling bersinergi secara dialektis, baik secara sosio-kultural, ekonomi, maupun ideologis dalam memperkaya dan memperkuat visi atau cara pandang keindonesiaan, yang disebut Wawasan Nusantara.

Masing-masing masyarakat kepulauan memiliki ruang kepribadiannya yang khas, karena setiap manusia (individu maupun komunitas) kepulauan mengidentikkan diri dalam sebuah ruang personal kepulauan dengan sebuah pemaknaan diri yang khas, sistemik dan mendasar. Pulau, kepulauan dan dirinya adalah sebuah fakta diri atau fakta eksistensi yang tidak dapat dipisahkan, karena dari pulau itulah ia menerima status sosial dan penamaan diri dengan segala hak keistimewaannya.

Masing-masing masyarakat kepulauan memiliki pula sejarah sendiri, cara berpikir dan cara bertindak sendiri-sendiri dalam menyingkap dan merespon realitas kepulauannya yang berbeda karakter geografisnya. Hal itu telah membentuk semacam tabiat dan watak (karakter) asli atau kejiwaan alami yang khas pula bagi masing-masing masyarakat kepulauan.

D. Cara Berpikir dalam Membangun Konsep Dirinya

Berdasarkan hasil pemetaan epistemologis atas berbagai pengamatan empiris yang telah dilakukan tentang fenomena kehidupan di masyarakat kepulauan di Maluku, serta memperhatikan berbagai hasil penelitian lain pada berbagai komunitas masyarakat kepulauan di wilayah lain di tanah air, tampak bahwa masing-masing masyarakat kepulauan mempunyai sistem pengetahuan (*local knowledge*) sendiri, warisan nilai (*local value*) sendiri, serta mempunyai organisasi sosial (*local institution*) di lokalnya masing-masing. Masing-masing keu-

nikan aset intelektual, sosial maupun kebudayaan masyarakat kepulauan itu dibentuk sendiri dengan rasio alaminya masing-masing yang asli (otentik). Rasio alami itu mula-mula bertumbuh dari adanya sebuah taraf kesadaran kosmik, yakni ketika orang menyadari dirinya dalam sebuah realitas alam kepulauan, kemudian menuju ke taraf kesadaran magis atau mistik (kesadaran religius), yakni ketika orang menyadari dirinya ada di bawah determinasi kekuatan alam dan supra alam yang magis, dan akhirnya taraf kesadaran sosial, yakni ketika orang (para individu) mulai menggunakan akalanya untuk berusaha membangun harmoni dengan alam kosmos yang fisik maupun metafisik. Pada taraf purna inilah orang mulai melakukan sebuah taraf pengorganisasian diri dalam bentuk komunitas-komunitas basis masyarakat kepulauan melalui proses-proses pelebagaan tradisi adat sebagai sebuah wujud pewarisan dan pelestarian rasio hidup masyarakat kepulauan di setiap komunitas masyarakat kepulauan. Pada taraf inilah rasio alam masyarakat kepulauan telah berkembang dan mengalami sebuah arus transformasi menjadi rasio sosial.

Arus perkembangan kesadaran rasio dari bentuk rasio alam ke rasio magis, dan akhirnya menjadi rasio sosial itu secara bertahap membentuk filsafat masyarakat kepulauan dengan segala kekayaan ide, kearifan, asumsi moral, dan perilaku etisnya (Watloly, 2007: 5). Filsafat hidup masyarakat kepulauan itu dengan demikian menjadi jauh lebih bersifat rasional etis, bukan rasional formal (akademis). Kini, rasionalitas etis masyarakat kepulauan makin berkembang ke taraf rasionalitas baru yang disebut rasionalitas industrial. Meski taraf perkembangan ini belum merata karena hanya baru terasa pada beberapa masyarakat kepulauan yang menjadi pusat perkembangan industri.

Keragaman filsafat itu pula membuat mereka memiliki dan mewarisi seni hidup masing-masing, baik dalam seni vokal, seni tari, seni rupa, ukir, tenun, batik, arsitektur, adat perkawinan, dan lain-lain. Hal tersebut jelas terlihat dari cara membangun rumah adat mereka yang berbeda-beda, menganyam ragam hias pakaian, melukiskan simbol-simbol, dan jargon-jargon yang semuanya berbeda-beda. Orang Maluku selalu bersikap periang, suka bernyanyi dan berseni vokal bersahut-sahutan, baik dalam irama lagu maupun kata (tanpa irama musik dan lagu); orang Nusa Tenggara pandai menenun; orang Buton, Bugis dan Madura pandai melaut; orang Papua senang mengukir dan menari; orang Bali pintar memainkan gamelan; semua itu dapat dijelaskan dari pola pikir yang terstruktur secara sistemik dalam perilaku masyarakat kepulauan yang membentuk dan membesarkan mereka masing-masing.

Masyarakat kepulauan Maluku, Riau, atau Papua, sebagaimana pula masyarakat kepulauan Indonesia lainnya bisa menikmati musik *jazz*, namun ketika mendengarnya, mereka tidak pernah merasa melihat cermin diri atau bayangan batinnya sendiri dan tidak pernah merasa berada di rumahnya sendiri. Masyarakat kepulauan itu bisa

berjingkrak-jingkrak mendengarkan music *rock* atau *reggae*, tetapi tetap tidak memiliki cita rasa seperti berada di rumahnya sendiri. Hal itu berlainan apabila mereka, misalnya orang Maluku mendengar musik *totobuang*, atau Maluku Barat Daya mendengar suara *tifa* dan irama nyanyian tarian adat *seka*, atau orang Minahasa mendengarkan musik suling bambu, atau orang Jawa mendengar lagu keroncong, *gendhing-gendhing* Jawa dan Madura, *degung* dan kecapi Sunda, atau gamelan Bali. Mereka masing-masing merasa di rumah dan melihat cermin dirinya sendiri. Suatu jenis musik bisa dikatakan sebagai hasil kebudayaan suatu masyarakat kepulauan, apabila ia lahir dan tumbuh, serta dicipta oleh seniman yang hidup di negeri tempat masyarakat kepulauan itu besar dan tumbuh. Unsur-unsurnya mungkin dipengaruhi oleh kebudayaan lain di luarnya, tetapi ia bukan hasil tiruan dan jiplakan. Pertumbuhan tradisi seni masyarakat kepulauan tersebut, bukan pula karena adanya industri hiburan, melainkan karena kreativitas mereka dalam membangun harmoni diri dengan alamnya masing-masing, atau karena kebutuhan mereka sendiri. Keanekaragaman adat dan budaya masyarakat di suatu daerah kepulauan akan menjadi identitas tersendiri bagi daerah kepulauan tersebut, dengan cita rasa diri yang khas.

Keunikan cara berpikir itu membentuk pula perkembangan sejarah pemikiran dan cara pandang hidup masyarakat kepulauan yang berbeda-beda, meskipun terjadi proses saling mempengaruhi di antara mereka. Kenyataan tersebut dapat dijumpai pada masyarakat Kepulauan Maluku, misalnya dalam tradisi *Pela* di Maluku Tengah, *Maren* di Maluku Tenggara, *Kai-Way* di Pulau Buru, *Kalwedo* di Maluku Barat Daya, *Duan-lolat* di Maluku Tenggara Barat atau *Jabu* pada masyarakat kepulauan Aru dan *Kalwedo* di Maluku Barat Daya. Sebagai akibatnya, meskipun tampak begitu mencolok perbedaan di dalam tradisi berpikirnya masing-masing namun mereka bersinergi membangun sebuah gagasan makro tentang hakikat diri mereka secara bersama-sama dalam sebuah ruang personal orang Maluku yang disebut *Orang Basudara* yang dilestarikan dalam sebuah tabiat hidup yang disebut *Tabiat Hidup Orang Basudara* (Watloly, 2006). Misalnya, tradisi *Kalwedo* di Kepulauan Maluku Barat Daya, sebuah kabupaten pemekaran yang baru di daerah Kepulauan Maluku. Daerah Kepulauan Maluku Barat Daya (MBD) terdiri atas 48 buah pulau kecil yang saling berjauhan dan terpisah oleh lautannya yang luas dan cenderung beriklim ganas. *Kalwedo*, sebagai sebuah vokal kehidupan masyarakat kepulauan MBD, menandai adanya sebuah kata hati atau suara hati mereka, dalam berbagai lintasan generasi sampai kini dalam menjaga, memelihara, dan merekonsiliasi hubungan-hubungan persaudaraan mereka bersama, meskipun mereka saling berbeda pulau, negeri, atau bahasa. Ketika mereka saling bertemu, baik di tengah laut dengan perahu layar atau di darat kepulauan ketika hendak singgah, maka mereka selalu menggunakan kata *Kalwedo* sebagai salam

persaudaraan yang disusul dengan lagu-lagu adat penanda salam persaudaraan, dan itu harus dibalas dengan kehangatan persaudaraan oleh sesama saudaranya di pulau yang sedang didarati itu. Sapaan balasan dari darat pulau itu bisa dengan lagu adat atau pantun-pantun yang dibahasakan dengan bahasa tanah, yang menggambarkan akar-akar kata bahasa asli yang ada dalam bahasanya masing-masing yang saling berbeda, dengan cita rasa persaudaraan yang tinggi. Budaya *Kalwedo* juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di antara mereka, baik itu persoalan perkawinan adat dengan segala tuntutan maupun persoalan-persoalan sosial, kepemimpinan adat, ekonomi, dan sebagainya. Setiap peristiwa adat, misalnya adat tutup rumah atau adat perkawinan, selalu menggelar lagu, tarian atau pepatah adat, yang selalu disela dan dimeriahkan dengan vokal *Kalwedo* oleh orator adat dari berbagai kelompok adat, negeri, atau kepulauan. Bila Sang orator meneriakkan vokal: “*Kalwedo, ho Kalwedooo*”, sebagai cetusan suara hati maka akan disambut meriah oleh peserta dengan teriakan “*heiii*”, sebagai tanda kokohnya persaudaraan dan pulihnya hubungan, baik di antara mereka maupun antara mereka dengan leluhur (*tete nene moyangnya* di dunia adikodrati) (Laboratorium Sosiologi, FISIP UNPATTI, 2010). Vokal *Kalwedo* dengan demikian adalah sebuah bentuk kearifan lokal masyarakat adat di Kepulauan Maluku Barat Daya, yang kaya struktur dan konten nilainya, sebagai ideologi pemer-satu Orang Maluku Barat Daya.

Tradisi budaya masyarakat kepulauan berkembang dalam tiga pilar, yaitu; kumpulan bahan tradisi adat masing-masing masyarakat kepulauan (*corpus*); suasana atau keadaan lingkungan masyarakat kepulauan (*context*); dan isi pikiran, muatan atau kandungan nilai keutamaan yang menjadi inti (*content*) hidup yang diwarisi masing-masing masyarakat kepulauan, baik dalam bentuk tradisi seni, puisi, mantra-mantra, cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain sebagainya. Masing-masing keunikan diri yang tersimpan dalam seni vokal masyarakat kepulauan itu merupakan ciri asasi dan fakta kodrati yang sekaligus menandai sebuah sukma keindonesiaan yang otentik, karena telah menjadi modal eksistensi, modal sosial, modal kerohanian, dan modal ekonomi dalam membangun keindonesiaan yang kuat, berbudaya, dan bermartabat dengan klaim-klaim ideologis, konstitusional, teritorial, maupun kebudayaan bangsa yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*. Semua aset atau modal hidup masyarakat kepulauan tersebut memiliki nilai-nilai keluhuran, serta hak sosial maupun ideologis yang sama dan sederajat dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara dengan sebuah subjektivasi dan objektivasi diri yang cair. Tidak ada yang saling mendeterminasi, tetapi saling mengakui dan bekerja sama. Hukum keutamaannya adalah saling menerima, saling mengakui, dan saling bekerja sama secara tertib dan adil dalam sikap kesamaan hak.

E. Laut Kepulauan dalam Tatanan Konsep Diri Masyarakat Kepulauan

Setiap komunitas masyarakat kepulauan selalu mengidentifikasi diri dan mengkonsepsikan dirinya masing-masing secara luas mendalam yang terkait dengan realitas alam kepulauannya (masa benda padat, cair maupun aneka simbol), dalam pendekatan kosmologis, ideologis, maupun sosio-kulturalnya yang bertautan secara utuh. Laut kepulauan (berbeda dengan laut pulau atau laut dalam arti yang umum) bukanlah sebuah realitas kosong yang tidak bernama dan tidak beridentitas. Ia harus dimengerti dalam arti khusus dan riil yang melingkari suatu gugus atau rumpun pulau serta mengesankan sebuah gambaran diri yang utuh dan sistemik dalam sebuah pendekatan yang khas metafisika, kosmologi, dan kosmogoni masyarakat kepulauan.

Laut kepulauan memaknakan sebuah nilai eksistensi yang hakiki dan fundamental bagi setiap komunitas masyarakat kepulauan. Ia memiliki potensi, peran dan fungsi strategis bagi kepentingan-kepentingan yang besar sebagai suatu zona eksistensi bagi masyarakat kepulauan. Ia bahkan adalah sebuah fakta eksistensi bagi masyarakat kepulauan. Banyak peristiwa eksistensi masyarakat kepulauan yang terderivasi dari laut kepulauannya, sehingga mereka memiliki berbagai mitos dan legenda tentang laut kepulauannya dengan segala kekayaan biotanya. Ungkapan bijak bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai samudera atau perairan laut yang luas menunjukkan bahwa keutuhan eksistensi masyarakat kepulauan Indonesia bukan hanya tergantung pada posisi daratan pulaunya tetapi menyatu secara utuh dengan wilayah lautannya dalam sebuah ruang atau zona eksistensi. Laut kepulauan masyarakat kepulauan Indonesia dengan demikian adalah zona eksistensi bangsanya yang tidak dapat dipisahkan dari diri dan kehidupan masyarakat kepulauan, karena menyatu secara utuh dalam konteks sosialnya. Laut bagi mereka bukanlah wilayah tak bertuan akan sebuah hak kepribadian, sebab lautan kepulauan adalah sebuah ruang kepribadian yang menyatu secara utuh dengan daratan pulaunya.

Laut kepulauan memiliki nilai sejarah, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai etis, dan nilai religius bagi setiap masyarakat kepulauannya. Ia adalah laut yang bernama dan beridentitas dengan nilai-nilai subjektifnya yang tinggi, karena mereka memiliki berbagai fakta sejarah, mitos, dan legenda tentang laut kepulauannya dalam sebuah konstruksi kehadiran diri mereka yang utuh. Konsekuensinya, laut kepulauan bagi masyarakat kepulauan tidak hanya bersifat fisik material, tetapi sebuah dunia metafisik yang luas, karena memiliki sejumlah nilai yang menyatu secara utuh dengan eksistensi mereka. Menjaga keutuhan dan kenyamanan laut sama halnya dengan menjaga keutuhan dan kenyamanan diri dalam sebuah tugas eksistensi. Komunitas masyarakat kepulauan, seperti di Maluku Tengah, karena itu memiliki pasukan adat yang disebut *Kewang* untuk menjaga dan mengawasi

wilayah mereka, baik laut maupun darat, sehingga ada *Kewang Laut* dan *Kewang Darat*. Bila mereka mau melakukan panen hasil laut, misalnya, *selam (molo) lola* dan *batulaga* maka terlebih dahulu harus dilakukan ritual adatnya. Ritual adat itu adalah sebuah *buka sasi* dan *tutu (tutup) sasi*. Ada ritus *sasi dusun* di wilayah darat dan *sasi meti* di wilayah laut guna menjaga kesegaran eksistensinya masing-masing dengan alam kepulauannya. Mereka memiliki keyakinan bahwa bila semua ritus *sasi meti* itu ditaati dengan baik maka *meti* tersebut akan mengeluarkan hasil yang baik, namun bila tidak maka hasilnya tidak baik.

Ada pula ritus *sasi ikan lompa* di Haruku, Pulau Harus, Kepulauan Lease yang ritual pelaksanaannya setiap tahun dengan acara yang cukup meriah sehingga kini telah menjadi semacam ajang wisata. Ada juga *sasi meti* di sebagian besar masyarakat Kepulauan Maluku, khususnya di Kepulauan Maluku Tenggara, Kepulauan Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, dan sebagainya. *Sasi laut* tersebut meliputi ikan dan juga semua biota laut, termasuk di dalamnya adalah pemulihan pohon bakau. *Sasi laut* tersebut biasanya berlaku setiap tiga bulan dan dijalani dengan sikap *awas (tabuh)* sampai waktu *buka sasi meti* sebagai saat panen bahagia yang selalu dinanti-nantikan. Biasanya acara *buka sasi meti* selalu menjadi ajang yang meriah dan membahagiakan.

Ada pula wilayah laut lepas di zona wilayah kepulauan yang juga menyatu secara faktual maupun historis dengan eksistensi hidup masyarakat kepulauan. Misalnya, ada kelompok masyarakat kepulauan di wilayah Kepulauan Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya yang selalu mengafirmasi zona eksistensinya secara luas dengan laut kepulauannya. Berbagai mitos yang dimiliki oleh masyarakat adat di Kepulauan Aru menunjukkan bahwa mereka menghayati diri secara utuh dalam hubungan dengan ikan hiu dan ikan paus, sebagai moyang (leluhur). Hal yang sama juga dapat dijumpai di masyarakat Kepulauan Maluku Barat Daya yang memiliki akar sejarah yang begitu kuat dengan laut dan ikan Layar yang disebut *Upu Srui* dan jenis ikan lumba-lumba (*Lopu*).

Upu Srui adalah leluhur (*upu*) yang menurut kepercayaan masyarakat Kepulauan Maluku Barat Daya (MBD) berwujud seekor ikan layar raksasa dengan kekuatan saktinya yang tinggi. Menurut legenda Orang Maluku Barat Daya (MBD), beberapa pulau di daerah kepulauan ini dulunya hanya merupakan satu daratan pulau yang besar, namun karena marah, *Upu Srui* mengamuk dengan layarnya yang lebar dan menghancurkan serta memecah belah pulau itu menjadi beberapa bagian pulau (pulau-pulau kecil) yang kini ada di Maluku Barat Daya (MBD), seperti Pulau Luang, Sermatan, Teon, Nilai, Serua, Damer, dan lain-lain. Selain ikan layar (*Upu Srui*), ada marga tertentu dalam komunitas masyarakat adat di Kepulauan MBD yang memiliki keterikatan kepercayaan yang kuat dengan laut kepulauannya, khususnya dengan jenis ikan lumba-lumba yang dalam bahasa setempat disebut

Lopu, sebagai leluhur (*Upu*) yang siap menolong mereka kalau mengalami kecelakaan di laut. Sebagai contohnya adalah marga *Palpialy* di Pulau Luang MBD yang meyakini memiliki hubungan dengan ikan lumba-lumba (*Lopu*) yang selalu timbul tenggelam dengan kepiawaiannya beratraksi di permukaan laut. *Palpialy* artinya timbul-tenggelam seperti ikan lumba-lumba.

Kedudukan laut kepulauan memang begitu berarti dalam paham eksistensi masyarakat Kepulauan Maluku Barat Daya (MBD), namun ada juga masyarakat adat di Kepulauan Aru yang memiliki akar sejarah yang begitu kuat dengan lautnya. Eksistensi sosial mereka sebagai kelompok masyarakat adat *Ursia* dan *Urlima* bahkan berasal dari dunia laut. *Ursia* dan *Urlima* adalah dua leluhur masyarakat Kepulauan Aru di Maluku yang saling bertarung melalui jalur laut untuk memperluas wilayah kekuasaan dan membagi Kepulauan Aru menjadi dua kekuatan besar atau kelompok *Urlima* dan *Ursia*. Masyarakat Kepulauan Aru oleh karenanya selalu mengelompokkan diri dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok *Ursia* yang diasalkan dari leluhur ikan Hiu dan kelompok *Urlima* yang diasalkan dari leluhur ikan paus. *Urlima* merupakan sebuah kesatuan masyarakat adat di Aru yang dikonstruksikan dari semua turunan ikan Paus. *Ursia*, sebaliknya merupakan bagian dari turunan Ikan Mangiang atau ikan Hiu yang ada di Kepulauan Aru. Pandangan sejarah *Ursi* dan *Urlima* tersebut begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Aru. Jadi, laut Kepulauan MBD adalah sebuah fakta diri dan zona eksistensi bagi komunitas masyarakat kepulauan di Kepulauan Aru maupun Maluku Barat Daya (MBD) dan masyarakat Kepulauan Teon, Nila, dan Serua (TNS) karena ia merupakan sebuah kesatuan dengan daratan pulaunya.

1. Laut kepulauan sebagai ruang sosial

Penghayatan diri (eksistensi) masyarakat kepulauan tidak terbatas pada wilayah daratan pulaunya dengan isi kandungannya yang terbatas, tetapi menyatu dengan luasnya akses mereka ke laut sebagai ajang kehidupan yang dilakoni dalam sebuah ruang sosio-kultural masyarakat kepulauan. Laut kepulauan telah mementaskan berbagai peristiwa sosial yang besar dalam rangka mengorganisasi kehidupan sosial di darat, seperti: berbagai ruang sejarah, jejaring sosial, kearifan lokal, legenda, mitos, ritus, seni vokal, lagu, tarian, dan aneka tradisi yang menyatu dalam penghayatan batin maupun nalar sosial yang sakral serta diwarisi dari generasi ke generasi. Hal itu nyata dalam berbagai tradisi hidup masyarakat Kepulauan Maluku, dengan ikatan-ikatan sosialnya yang kuat, seperti: *Pela*, *Gandong*, *Belang*, dan *Rurehe*.

Pela adalah bentuk hubungan sosial (ikatan kekerabatan dan persaudaraan) masyarakat Kepulauan Maluku yang bersifat lintas pulau. Hubungan-hubungan tersebut tidak bersifat genealogis, tetapi sosiologis dan memiliki akar-akar kultural adatis yang sangat kuat dalam sejarah keberadaan mereka yang bersifat lintas pulau maupun lintas

keyakinan. Hubungan-hubungan itu bersifat subjektif-emosional yang tinggi karena selalu arahkan dan diawasi oleh leluhurnya masing-masing.

Ikatan persaudaraan dalam *Pela* merupakan sebuah tradisi hidup masyarakat Kepulauan Maluku yang banyak tercipta di laut oleh kisah hidup para leluhurnya masing-masing. *Pela* dalam kenyataannya menunjuk pada ikatan kesatuan dan persaudaraan antara dua negeri baik Islam maupun Kristen di Maluku Tengah. Masing-masing negeri tersebut memiliki pula ikatan *Gandong* dengan negeri lainnya dalam sebuah jejaring sosial adatis. Banyak sejarah peristiwa *Pela* yang terjadi karena sikap tolong-menolong di laut, misalnya kisah terbentuknya ikatan persaudaraan *Pela* antara negeri Tenga-Tenga (Islam) di Ambon dengan negeri Abubu (Kristen) di Pulau Nusalaute atau *Pela* antara Negeri Paso (Kristen) dan Batumera (Islam) di Pulau Ambon, negeri Haria (Kristen) dengan negeri Siri Sori (Islam), negeri Batu Merah (Islam) dengan negeri Passo (Kristen), negeri Asilulu (Islam) dengan negeri Galala (Kristen), dan sebagainya.

Gandong adalah salah satu bentuk ikatan sosial (ikatan persaudaraan) yang begitu kuat pada masyarakat kepulauan Maluku, baik secara lintas pulau maupun lintas keyakinan. Ikatan ini berbeda dengan ikatan persaudaraan dalam *Pela*, karena persaudaraan di dalam *pela* bukan berdasarkan garis keturunan (genealogis) maka ikatan persaudaraan dalam *Gandong* didasarkan pada garis keturunan (genealogis). Apabila ikatan sosial atau ikatan persaudaraan *Pela* menyiratkan persaudaraan antara dua negeri atau desa, maka *gandong* lebih luas cakupannya. *Gandong* bisa mencakup lebih dari dua negeri atau desa. Contohnya, negeri Siri-Sori (Islam) dengan negeri Siri-Sori Sarani (Kristen) di Saparua dan negeri Tamilow (Islam) di Seram dengan negeri Hutumury di Ambon.

Belang adalah sebuah tradisi hidup masyarakat kepulauan yang terjadi di laut. *Belang* sebagai sebuah wadah fisik (sarana transportasi di laut) dengan pola manajemennya yang begitu jelas mendistribusikan status dan peran atau pembagian kerja awaknya untuk menggerakkan produktivitas telah lekat dengan pola kehidupan dan tradisi kehidupan masyarakat kepulauan di Maluku. Pola manajemen sosial di *Belang* telah membentuk sebuah watak sosial bagi mereka, sehingga ditransformasikan di dalam tatanan kehidupan sosial di darat dengan pembagian status dan peranan yang jelas. *Belang* di sisi lain telah menjadi rujukan identitas sosial seseorang dalam sebuah transaksi sosial yang luas, bahkan juga dalam kehidupan keberagamaan seseorang. Misalnya, seseorang hendak melakukan transaksi sosial atau adat maka yang pertama ditanyakan adalah: apa nama *belang*-mu. Artinya, *Belang* telah menjadi sebuah konstruksi sosial di darat dalam sebuah tatanan masyarakat adat kepulauan. *Belang* sebagai sebuah simbol identitas sosial telah menjadi sebuah *icon* dan *password* diri dalam menentukan kejelasan diri dan identitas seseorang atau sekelompok (marga) dalam masyarakatnya.

Rurehe, sebagaimana halnya dengan tradisi *Pela* dan *Belang* yang terjadi di laut, telah menjadi rujukan manajemen sosial di darat dengan muatan nilai-nilai filosofis yang tinggi. *Rurehe* memiliki korelasi filosofis yang sama dengan *Belang*, namun diabadikan dalam konteks masyarakat Kepulauan Maluku yang berbeda. Bila manajemen sosial *Belang* banyak dijumpai di Maluku Tenggara (Kepulauan Kei) maka *Rurehe* lebih banyak dijumpai di Maluku Tengah. Manajemen *Rurehe* didasarkan pada prinsip-prinsip pembagian kerja dalam posisi sosial yang jelas dan tegas, sehingga mereka bukan hanya dituntut untuk trampil dan profesional dalam bidang kerjanya masing-masing, tetapi juga mengidentifikasi posisi sosialnya masing-masing dalam sebuah tatanan birokrasi adat guna membangun sebuah produktivitas sosial yang memadai. Secara filosofis, *Rurehe* merupakan sebuah wadah sosial yang mengakomodasi peran dan status seseorang dalam masyarakat kepulauan.

Ada lagi sebuah tradisi yang unik selain ketiga tradisi di atas dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Maluku Barat Daya (MBD) yang disebut *Kalwedo*. Tradisi *Kalwedo* lahir dari sebuah tradisi yang berlatar belakang laut kepulauan. Kebudayaan *Kalwedo* meliputi sebuah lokus teritori kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 48 buah. Hal ini mengakibatkan penduduknya tersegregasi dalam berbagai pulau kecil dengan rentang kendali yang luas. *Kalwedo* sebagai sebuah vokal (suara hati dan nada serta mada kehidupan) masyarakat Kepulauan MBD, namun demikian, telah menandai atau merepresentasi kata hati atau suara hati mereka sebagai satu keutuhan sosial, kultural maupun teritorial dari berbagai pulau dan dalam berbagai lintasan generasi sampai kini. Mereka memang saling terpisah jauh oleh bentangan laut kepulauannya yang luas, namun budaya *Kalwedo* begitu kuat menyuburkan, melanggengkan, menjaga, memelihara, dan merekonsiliasi hubungan-hubungan persaudaraan di antara mereka bersama. *Kalwedo* adalah kata hati bersama yang kuat mempersatukan mereka, meskipun mereka saling berbeda pulau, negeri, atau bahasa, dan berada dalam segregasi pulaunya masing-masing yang dibatasi oleh wilayah lautan kepulauannya yang luas dan beriklim ganas.

Laut kepulauan bukanlah pemisah tetapi jalan penghubung. Bagi masyarakat kepulauan, khususnya masyarakat pulau-pulau kecil, laut kepulauan yang mengitarinya adalah sebuah jalan yang menghubungkan dan mempersatukan kehidupan mereka. Laut kepulauan sebagai jalan telah menganyam mereka dari latar belakang pulau yang berbeda dan dalam sebuah ruang sosial yang luas. Mereka bukan hanya saling berjumpa dan saling bertukar, tetapi lebih daripada itu saling terintegrasi dari satu ruang sosial dengan berbagai modus jaringan sosial budaya yang khas. Mereka yang menempati pulau-pulau kecil, karena itu, banyak memiliki tradisi transportasi kelautan dengan sarana transportasi laut dan ketrampilan melaut, menyelam, dan berenang sebagai sebuah ketrampilan alami.

Masyarakat kepulauan sehubungan dengan eksistensinya yang menyatu padu dengan laut dan daratnya itu selalu menjadikan perahu sebagai sarana transportasi kelautan yang handal dalam merawat dan mengembangkan hidupnya. Perahu, karena itu, telah menjadi fakta historis yang paling umum dan paling populer di kalangan masyarakat kepulauan. Perahu banyak digunakan pula sebagai simbol perjuangan yang penuh dinamika arus tantangan di samudera raya yang luas atau kiasan untuk mengungkapkan perasaan dan harapan atau cita-cita masyarakat kepulauan. Mereka sering menggunakan metafora yang berhubungan dengan perahu untuk menggambarkan sebuah organisasi sosial yang merupakan suatu kesatuan jaringan interaksi yang saling mengisi dan saling bergantung. Laut kepulauan telah menjadi jalan bagi mereka untuk saling mengunjungi (*baku mangente*) serta memenuhi berbagai tugas adat yang harus dijalankan antarpulau (Ralahalu, 2012: 23). Ada tradisi *nyoli lieta* dan tradisi *neulilia* di masyarakat Kepulauan Maluku Barat Daya (MBD) yang harus dijalani dalam sebuah perjalanan laut. Juga hal yang sama dijumpai dalam kehidupan adat masyarakat kepulauan Maluku di Maluku Tengah, Seram, Lease, dan Ambon dengan tradisi *Panas Pela* yang banyak dilakukan dengan jalan laut melalui laut kepulauannya yang menghubungkan mereka.

2. Laut kepulauan sebagai ruang sejarah

Laut kepulauan telah menjadi sebuah ruang sejarah dalam pentas historis masyarakat kepulauan. Masyarakat Kepulauan Maluku yang sebagian besarnya adalah masyarakat adat selalu memiliki paham sejarah yang bersifat holistik (utuh dan menyeluruh). Masyarakat kepulauan oleh karena itu selalu melihat laut kepulauannya sebagai hal yang mendasar yang menyingkapkan dimensi-dimensi fundamental dalam eksistensinya secara menyeluruh sebagai masyarakat kepulauan, baik sejarah masa lalu, masa kini maupun sejarah masa depannya. Banyak yang kemudian memahami dan meyakini keberadaan diri dan kelompoknya yang sekarang sebagai sambungan dari peristiwa-peristiwa historis yang dialami oleh leluhurnya di laut.

Mereka di sisi lain juga melihat sejarah masa kini dan masa depannya dari laut kepulauannya itu. Laut adalah sebuah masa kini dan masa depan yang bernilai historis yang harus dipertahankan (Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 2005). Ibarat mereka sementara berenang di laut kepulauannya, pada saat mereka kehilangan laut kepulauannya, mereka akan tenggelam dalam sebuah kuburan sejarah yang sungguh memilukan. Konsekuensinya, menjaga kelestarian alam kepulauan dengan segala kandungan hayati dan ekosistemnya selalu terkait dengan tanggung jawab keberlanjutan eksistensi masyarakat kepulauan dengan lautnya. Laut mengandung nilai-nilai luhur kehidupan yang selalu menyapa mereka dari waktu ke waktu atau dari sejarah masa lalu, masa kini dan masa depannya. Paham sejarah me-

ngenai laut kepulauannya yang demikian itulah yang telah menghadirkan sebuah rasio alami atau rasio kepribumian bagi masing-masing masyarakat kepulauan Maluku. Rasio alam atau rasio kepribumian yang berspesifikasi laut itu telah menghadirkan paham kehidupan atau falsafah sejarah dalam membangun kehidupannya yang khas di tengah alam kepulauannya yang didominasi oleh alam laut kepulauannya itu.

Paham atau filsafat mengenai laut Kepulauan Maluku sebagai lumbung ikan menandai sebuah filsafat sejarah dengan tanggung jawab sejarah yang utuh (Watloly, 2009). Konsekuensinya, para pelaku lumbung ikan nasional harus meletakkan ambisinya dalam konsteks laut kepulauan sebagai ruang sejarahnya yang khas itu. Laut Kepulauan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional harus dibersihkan dari sesat pikir “kiniisme” yang hanya mengejar kenikmatan dan kesenangan hari ini (kini) semata, dan tidak menaruh perhatian dan tanggung jawab apa pun dalam menjaga kelangsungan hidup generasi hari esok. Jelasnya, laut memberi inspirasi dan perspektif pemikiran serta spirit kehidupan yang menghidupkan mereka dari generasi ke generasi.

3. Laut kepulauan sebagai ruang ekonomi

Masyarakat kepulauan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki pandangan yang khas tentang laut sebagai ruang ekonomi, yaitu: laut kepulauan sebagai sumber penghidupan dan sebagai tabungan masa depan generasinya. Masyarakat kepulauan oleh karenanya selalu melihat laut kepulauannya sebagai sebuah pusaka hidup. Laut kepulauan dengan segala gerak-geriknya juga menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan sistem mata pencaharian, teknologi pengolahan alam serta ilmu pengetahuan (*local knowledge*) untuk membangun kehidupan generasi masyarakat kepulauan yang lebih sejahtera.

Laut kepulauan sudah sejak lama memberi berbagai inspirasi untuk mengembangkan ketrampilan-ketrampilan berpikir praktis di bidang ekonomi, astronomi, navigasi, serta berbagai kearifan lokal mengenai musim berkebun atau mengolah alam di darat. Sebagai contoh, waktu membuat kebun, menanam benih, memotong pohon, menebang sagu, atau berburu di darat dengan melihat tanda-tanda alam pada laut kepulauannya, yang disebut *nanaku*. Orang harus memulai membuka lahan kebun baru, membersihkan kebun (*cuci kabong*), bakar kebun baru, dan menanam benih pertama pada kebun baru harus pada saat air *meti* besar secara sempurna (*aer meti tadudu*). Juga saat memotong kayu untuk bahan bangunan rumah harus dengan memperhatikan *tanoar*, yaitu harus pada saat bulan gelap dan *aer meti* dan menebang sagu pada saat air pasang (*aer pono*), menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, cengkih, pala, dan sebagainya harus pada bulan purnama atau *bulan pono*. Semua pandangan dan wawasan hidup itu dapat dilacak dari berbagai bentuk kearifan lokal yang

dimiliki oleh masing-masing masyarakat kepulauan Maluku.

Alur laut kepulauan Indonesia yang begitu luas tersebut menjadikan pulau-pulau yang ada di sekitar laut kepulauan itu sebagai alur transportasi laut (pelayaran) yang strategis. Ada yang melintasi alur transportasi laut yang panjang jaraknya, tetapi ada yang pendek. Ada yang lebar jaraknya, tetapi ada pula yang sempit jaraknya. Hal ini membuat Indonesia begitu terbuka dan menjadi negara dengan banyak pintu. Posisi geografis negara kepulauan Indonesia ini, makin menunjukkan letak strategisnya, baik secara geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik, karena menjembatani dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia dengan sejumlah negara besar di dalamnya, serta menyatukan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Keunggulan geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik tersebut merupakan sebuah anugerah Tuhan yang harus ditumbuhkembangkan demi kejayaan Indonesia. Banyak negara yang terletak di sekitar kepulauan Indonesia dapat menjadi mitra ekonomi dan perdagangan yang strategis bagi pengembangan Indonesia.

Laut kepulauan telah menjadi pentas historis kultural masyarakat kepulauan, baik dalam rangka aktivitas perekonomian maupun sosial budaya dengan serumpun pulau atau kepulauan lainnya. Hal itu telah membentuk semacam aliansi ekonomi dan budaya antarmasyarakat kepulauan yang bersifat lintas pulau, lintas daerah, dan lintas negara sebagai saudara (*sisters and brothers*). Hal itulah yang membedakan cara pandang masyarakat kepulauan dengan cara pandang masyarakat kontinental. Bila bagi masyarakat kontinental, laut dianggap sebagai sekat pemisah maka sebaliknya, bagi masyarakat kepulauan laut kepulauan adalah pentas sosial dan sarana pemersatu, sehingga tidak ada laut bebas tak bertuan di dalam wilayah laut kepulauan. Itulah juga sukma eksistensi masyarakat kepulauan Indonesia yang tidak dapat disangkal atau diingkari oleh bangsa ini maupun kekuatan eksternal lainnya. Semua pandangan sejarah yang mewarnai wawasan dan tradisi hidup masyarakat kepulauan itu dapat dilacak dari berbagai bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat kepulauan Maluku. Berdasarkan paham sejarahnya itu maka bila dipelajari tradisi hidup masyarakat kepulauan Maluku sejak zaman prasejarah telah ada kecenderungan kuat dari setiap bangsa atau kelompok manusia, yang memandang hidup sebagai perjuangan merebut ruang, dengan laut selalu yang menjadi ajangnya.

F. Memperkuat Konsep Diri Masyarakat Kepulauan dengan Jiwa Besar untuk Memperkuat Konsep Diri Keindonesiaan

Pengakuan diri Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia menunjukkan sebuah pandangan yang realistis tentang konsep diri keindonesiaan yang sejatinya. Konsistensi sikap kenegaraan itu membuat masyarakat Indonesia memiliki sebuah kesatuan sikap

dan pandangan (visi berbangsa dan bernegara yang kuat) dalam membangun ketahanan nasionalnya. Sikap pengakuan dan perilaku bernegara dalam konteks negara kepulauan, dengan demikian, harus didasarkan pada jiwa sebagai negarawan besar dari dalam diri orang-orang yang berjiwa besar, seperti para *founding fathers* bangsa ini. Kini kebesaran jiwa dengan keluasan wawasan ideologis yang terkristalisasi dalam Pancasila itu perlu dihayati kembali dalam penyelenggaraan negara agar benar-benar Indonesia kita terbangun secara kuat ideologis, kuat pribadi kenegarawan berbangsa, kuat sosio-kultural maupun kesejahteraan hidup (Latif, 2011: 21).

Realitas objektif masyarakat kepulauan Indonesia itu sendiri sungguh telah mengandaikan sebuah pandangan filosofi yang bukan hanya prorealitas, tetapi secara hakiki proeksistensi keindonesiaan yang berbasis kepulauan dan masyarakat kepulauan. Bagi masyarakat kepulauan Indonesia yang berjati diri, paham nasionalisme Indonesia dan ideologi Pancasila yang berlatar Nusantara atau negara kepulauan itu bukan hanya sebuah permainan wacana dan isu politik, tetapi merupakan nilai kehidupan hakiki dan otentik yang harus dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Argumen-argumen filsafati itu bersifat ontologis maupun epistemologis dengan kepenuhan kewajaran nilai-nilai aksiologisnya yang bersifat afirmatif logis maupun ideologis, dan karenanya harus dipraktikkan dalam hidup sehari-hari.

Masyarakat kepulauan sebagai basis teritori dan basis ideologis keindonesiaan yang asli dan otentik itu harus menjadi sumber inspirasi bagi kebijakan pembangunan yang makin menyuburkan dan meluhurkan diri keindonesiaan. Kebijakan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa yang tidak berpihak pada masyarakat kepulauan bukan hanya menyimpang keluar (bias) dari ideologi bangsa tetapi lebih daripada itu makin menyesatkan kehidupan bangsa dan negara dalam kepalsuan dan kehancuran. Warisan konsep pembangunan yang lama, yang menekankan pembangunan berbasis pada daratan, dengan demikian harus diubah dengan pendekatan pembangunan berbasis daratan dan lautan sebagai ciri utama pembangunan berbasis masyarakat kepulauan.

G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa:

1. Masing-masing masyarakat kepulauan pada basis kepulauannya (baik yang berkedudukan dekat, jauh, muka, belakang, pinggir, perbatasan, jauh tertinggal, atau maju), memiliki kebenaran diri (*true self*) dan konsep diri (*self concept*) yang jelas dan mendasar bagi diri individu dan komunalnya. Hal itu menegaskan bahwa ada banyak konsep diri masyarakat kepulauan di negeri Nusantara yang saling berbeda namun saling menyatu membentuk sebuah konsep diri keindonesiaan yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*.

2. Konsep diri masyarakat kepulauan itu bukan dibangun dari sebuah rasio akademis tetapi rasio sosial-adatis masing-masing komunitas masyarakat kepulauan yang bersifat kontekstual dan beranekaragam, sehingga membentuk adanya kebudayaan bangsa yang berbasis pada kebudayaan masyarakat kepulauan (masyarakat bangsa-bangsa). Pola struktur rasional sosial-adat yang menjadi dasar konsep diri masyarakat kepulauan tersebut tidak mengandung sebuah penalaran lurus, tetapi penalaran yang sifatnya melingkar (siklus). Pola rasio yang terpantul dengan daya refleksi dari cermin hati yang mendalam sebagai wujud akumulasi dari adanya sebuah arus utama kesadaran diri (*live mainstreaming*) yang berbasis kepulauan dalam sebuah cara pandang lokal (*indigenous perspective*).
3. Arus kesadaran diri (*live mainstreaming*) yang menjadi *causa prima* serta cara pandang lokal (*indigenous perspective*) yang menjadi *causa formalis* dari konsep diri masyarakat kepulauan itulah yang selalu aktif bekerja dalam pikiran, perasaan, sikap dan perilaku serta tindakan-tindakan cerdas dari masing-masing komunitas masyarakat kepulauan dalam membangun dan mempertahankan hidup secara berkelanjutan. Konsekuensinya, konsep diri masyarakat kepulauan bukanlah sebuah rumusan rasional yang objektif formal dan tersurat, tetapi tersirat atau tersamar (*inclusive*), serta cenderung bersembunyi (*hidden*) di balik berbagai sistem-sistem keyakinan, tradisi dan atraksi hidup masyarakat kepulauan itu.
4. Konsep diri masyarakat kepulauan selalu terkait erat dengan hakikat keberadaan diri masing-masing komunitas masyarakat kepulauan. Ia mengandung pemikiran-pemikiran yang strategis bagaikan obor yang selalu menerangi jalan kehidupan para individu maupun komunal masyarakat kepulauan, serta mengandung nilai-nilai fundamental bagaikan jangkar dan benteng pertahanan serta dasar bangunan bagi keberlanjutan hidup para individu maupun komunal masyarakat kepulauan.
5. Pengakuan akan hak eksistensi dan pemantapan konsep diri masyarakat kepulauan berdampak simultan terhadap pemantapan wawasan kebangsaan dan corak hidup bernegara dalam keindonesiaan yang utuh dan berkelanjutan. Sikap kejiwaan yang besar oleh karenanya dibutuhkan untuk memperkuat konsep diri masyarakat kepulauan dalam rangka memperkuat konsep diri keindonesiaan.
6. Konsep diri masyarakat kepulauan terkait erat dengan konsep ruang sosial, ruang budaya dan ruang kepribadiannya masing-masing. Semuanya terbangun dari perspektif sosiologi mikro yang memandang masyarakat kepulauan sebagai ciri kodrat dengan sistem pengetahuan (*local knowledge*), warisan nilai (*local value*) dan organisasi sosial (*local institution*)-nya masing-masing. Hal itu terkait pula dengan laut kepulauan yang memaknakan sebuah nilai eksistensi hakiki dan fundamental bagi setiap komunitas masyarakat kepulauan. Laut kepulauan memiliki potensi, peran dan fungsi stra-

tegis bagi kepentingan-kepentingan yang besar sebagai suatu zona eksistensi bagi masyarakat kepulauan.

H. Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ajawaila, J.W., 2002, “Antropologi dan Pulau-Pulau Kecil, Sebuah Kajian Makro Tentang Pembangunan Masyarakat Pulau”, Orasi Pengukuhan Sebagai Guru Besar FISIP UNPATTI, Ambon.
- Boulan, Mc. dan Syauta, Saul, 1984, tentang “Uru Son Of The Sunrise (Uru, Lelaki dari Matahari Terbit)”, tidak diterbitkan.
- Burns, R.B., 1993, *Konsep Diri: Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku*, Arcan, Jakarta.
- Centi, P.J., 1993, *Mengapa Rendah Diri?*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hurlock, Elizabeth B., 1990, *Perkembangan Anak Jilid 1*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kaplan, David, & Manners A. Robert, 2002, *Teori Budaya, Cetakan ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2007, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- Kleden, I., 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, PT. Pustaka LP3S, Jakarta.
- Laboratorium Sosiologi, FISIP UNPATTI, 2010, *Inventarisasi Institusi Adat Lokal*, Hasil Penelitian Kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalis dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 2005, *Maluku Menyambut Masa Depan*, Ambon.
- Ralahalu, K. A., 2012, *Berlayar dalam Ombak, Mengabdikan Bagi Negeri*, Ralahalu Institut, Ambon.
- Watloly, Aholiab, 2005, *Maluku Baru, Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2006, “Filsafat Manusia Kepulauan”, *Jurnal Sosiologi*, Laboratorium Sosiologi, Jurusan Sosiologi FISIP UNPATTI.
- _____, 2007, “Filosofi Masyarakat Kepulauan, Sebuah Telaah Filsafat dalam rangka Indigenisasi Sosiologi Kepulauan”, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Pattimura ke-44, 5 Mei.
- _____, 2009, “Filosofi Lumbung Ikan”, Ceramah disampaikan dalam Seminar Nasional Maluku Lumbung Ikan Nasional, oleh Panitia Sail Banda, Ambon.
- _____, 2011, “Filosofi Pembangunan Berbasis Masyarakat Kepulauan”, disampaikan dalam Seminar Internasional, Forum Pertemuan Pimpinan Pascasarjana Perguruan Tinggi

Negeri se-Indonesia, di Ambon, 23 Mei 2011.
_____, 2011, "Voice of Archipelago, Perspektif Orang Maluku",
Materi Seminar Internasional dalam rangka Festival
Kesenian Indonesia tahun 2011 di ISI Surakarta.